

**PENGARUH PERSEPSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Siti Atikah
NIM : E20183012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2022**

**PENGARUH PERSEPSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Oleh:


Siti Atikah

NIM : E20183012

NIM : E20183012

Disetujui Pembimbing:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ana Pratiwi, SE., AK., MSA
NIP.198809232019032003
J E M B E R

**PENGARUH PERSEPSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI


Telah diujikan dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak
NIP. 198803012018012001


Suprianik, S.E., M.Si
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si

2. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Harta rampasan (Fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 546

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan bagi Allah S.W.T atas rahmat hidayahnya dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segenap rasa syukur yang telah memberikan kemudahan dan pemahaman sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan lancar. Karya yang sangat sederhana ini, penulis akan mempersembahkan siapa saja yang sudah menyupport dalam menyelesaikan tugas akhir ini :

1. Peneliti persembahkan untuk kedua orang tua terhebat, mengerti dalam hal apapun dan selalu menuruti keinginan peneliti (Juma'i dan Asnija) yang selalu mendoakan dan menyemangati supaya cepet menyelesaikan tugas akhir peneliti
2. Kakak terpengertian sekaligus kadang ngeselin Muslimatul Hasanah yang selalu memberikan pertanyaan kapan lulus
3. Keponakan tersayang Muhammad Naufal dan Alvino Daffa Muwaffaq selaku penyemangat supaya penulis cepet lulus biar bisa membantu membiayai pendidikan mereka meskipun kerjaan mereka selalu mendatangi peneliti supaya bisa di ajak main bareng
4. Serta keluarga besar yang senantiasa menanyakan peneliti kapan menyelesaikan tulisannya
5. Sahabat-sahabat seperjuangan dan teman-teman seangkatan Akuntansi Syariah angkatan 2018, khususnya Akuntansi Syariah 1 yang berjuang bersama dari awal semester hingga akhir telah memberikan semangat, perhatian, doa meskipun sudah ada yang mendahului dan harus semangat

bagi yang masih berjuang serta terima kasih atas kebersamaannya selama ini

6. Kepada kawan-kawan peneliti Dzurratul Qomariyah, Nofilatul Jannah, Unshilatun Nikmah, Fina Nur Asiyah Dan Masih banyak lagi yang selalu memberikan semangat super panas dalam menyuruh menyelesaikan tugas akhir ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semua karena terlalu banyak yang memberikan semangat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah S.W.T Karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Bondowoso” dapat terselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana di UIN KHAS Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan peneliti tentu berpengaruh terhadap kualitas skripsi peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan suatu hal yang sangat penting dan berharga bagi peneliti.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto., SE, MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Khamdan Rifai, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Plt. Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
4. Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ana Pratiwi, SE., AK., MSA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Drs. Wiratmo Mulyant, S.Pd.,M.Si. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih peneliti.

Peneliti menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, saran dan kritik diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah S.W.T



Jember, Oktober 2022

Siti Atikah
E20183012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Atikah, Ana Pratiwi, Pengaruh Persepsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Indikator tersebut terdiri dari rasio-rasio keuangan, salah satunya rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso? 2). Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso? 3). Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan dan secara parsial pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, serta pengujian uji instrument data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dibadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bondowoso. 2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dibadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bondowoso. 3) Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dibadan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bondowoso.

Kata Kunci : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ixi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Asumsi Penelitian	14
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	28

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	30
A. Kajian Terdahulu.....	30
B. Kajian Teori.....	38
1. Pendapatan Asli Daerah	39
2. Dana Alokasi Umum.....	42
3. Dana Alokasi Khusus	44
4. Kinerja Keuangan Daerah.....	46
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data.....	53
C. Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis.....	55
D. Pembahasan	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

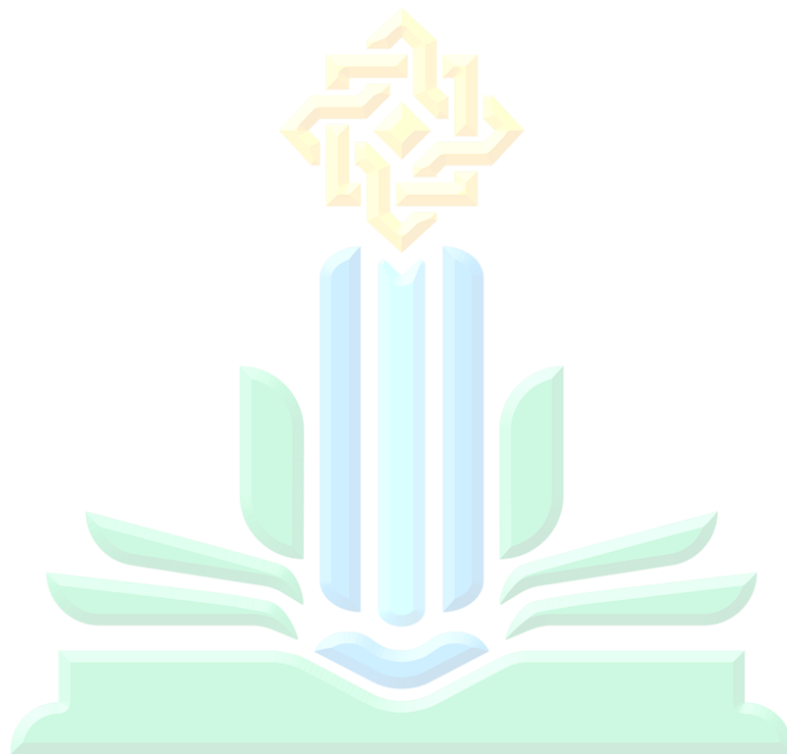
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Skala Likert.....	21
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 3.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Menduduki Jabatan.....	54
Tabel 3.4 Hasil Uji Reabilitas Pendapatan Asli Daerah (X_1).....	57
Tabel 3.5 Hasil Uji Reabilitas Pendapatan Asli Daerah (X_1).....	58
Tabel 3.6 Hasil Uji Reabilitas Dana Alokasi Khusus (X_3).....	58
Tabel 3.7 Hasil Uji Reabilitas Kinerja Keuangan (Y).....	59
Tabel 3.8 Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 3.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	64
Tabel 3.10 Hasil Uji t (Parsial).....	66
Tabel 3.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Konseptual Pemikiran... 14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan menegaskan kembali Otonomi Daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang kemudian dilakukan revisi kembali pada tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 ini tetap menitik beratkan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota, yang bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang di himpun dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain UU No. 23 Tahun 2014 dalam UU No. 33 Tahun 2014 juga telah ditetapkan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggung jawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam rangka *desentralisasi fiskal*. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan kuangan pusat daerah

² Abdullah Febriasyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan" (Universitas Bengkulu).1

dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU Nomor 33 tahun 2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan pemerintah pusat juga akan mentranfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula

³ Ibid.,1

ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.⁴ Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten / kota pada umumnya adalah adanya keterbatasan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagai mestinya. Kemandirian daerah merupakan aplikasi dari otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Sehingga daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu tolak ukur untuk melihat

⁴ Abdullah Febriasyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan" (Universitas Bengkulu).1

kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dapat mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Ardhany, untuk meningkatkan pelayanan *public*, pemerintah akan menambah aset tetap dari pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Sedangkan menurut Julitawati, Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, bila Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami kenaikan.⁵

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*. Jenis dana ini adalah dana yang di

⁵ Ibid.,3

transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan *Desentralisasi*.⁶

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan problematika daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 tahun 2004). Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian, serta kelautan yang termasuk dalam belanja modal dan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar presentasi dana yang dikeluarkan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan semakin berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan menggunakan prinsip *desentralisasi fiskal*, dimana kewenangan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah.

⁶ Farhan Kresna Pramudya, "Analisis Pengaruh PAD,DAU,DAK terhadap belanja modal", (Universitas Muhammad Malang).

Keuangan daerah dikelola melalui anggaran daerah, yakni rencana keuangan yang disusun berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah. Anggaran daerah di Indonesia disebut APBD, yang memuat rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu cara untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah baik atau belum yaitu dengan cara pengukuran kinerja keuangan. Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Indikator tersebut terdiri dari rasio-rasio keuangan, salah satunya adalah rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Kinerja Keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah dalam bentuk pengelolaan APBD dinyatakan bahwa sumber daya pemerintahan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DAU Dan DAK).

Kinerja Keuangan berpengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar pendapatan tersebut maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh dan Kinerja Keuangan akan semakin membaik, begitupun sebaliknya jika Kinerja Keuangan menurun, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan menurun dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber utama dari Pendapatan Daerah. Sehingga jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) naik, maka kegiatan terlaksana dengan baik dan Kinerja akan meningkat.

Bondowoso merupakan kota atau kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.560,10 km² atau setara dengan 26% dari luas total provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa, dan 913 Dusun. Badan Pengelolaan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah adalah sebuah instansi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 79 Tahun 201 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga teknis pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso dan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang *efektif, efisien, transparan, dan akuntabel* sesuai dengan Permendagri No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan pemerintah Kabupaten Bondowoso turun signifikan pada tahun 2020 di era semaraknya covid19, dari mulanya sebesar Rp. 232.926.089.574,95 terjadi penurunan sebesar Rp. 24.005.605.364,95. Meski terjadi peningkatan pada penerimaan hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah sebesar Rp. 225.867.057,23, namun terjadi penurunan di tiga sektor lainnya. Akan tetapi dengan adanya kinerja keuangan daerah yang baik Kabupaten Bondowoso dapat berkembang dan

mengoptimalkan pertumbuhan daerahnya kembali ditahun 2021. Dengan ini kita bisa tau bagaimana permasalahan utama di dinas Pendapatan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tentang Kinerja Keuangan Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai target analisa tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja akuntansi pemerintah daerah. karena untuk memperoleh bukti empiris dari problematika tersebut maka peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Persepsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Bondowoso Pemerintah Daerah di Kabupaten Bondowoso”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian tersebut, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.⁷ Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, baik berupa manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkesinambungan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah di kabupaten Bondowoso, serta dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian karya ilmiah akuntansi.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya Tulis ilmiah* (Jember :IAIN Jember,2018),45

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberi gambaran mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah.

b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat menambah sumber kepustakaan di bidang akuntansi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten Bondowoso.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian

Secara teoritis, variabel merupakan suatu karakteristik atau *value* dari seseorang serta objek atau kegiatan yang memiliki variasi khusus sehingga peneliti mengambil keputusan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan

atas hal tersebut.⁸ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis variabel yakni variabel independen dan variabel dependen dengan uraian sebagai berikut:

a. Variable Independen

Variable independen merupakan variabel pengaruh atau penyebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Y). Istilah lain dari variable independen adalah variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* atau lebih dikenal dengan variabel bebas (X).

Dalam penelitian ini, yang merupakan variable independen sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (X_1)
- b. Dana Alokasi Umum (X_2)
- c. Dana Alokasi Khusus (X_3)

b. Variable Dependen

Variable dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat yang melatar belakangi variabel independen. Istilah lain dari variabel dependen adalah variabel *output*, kriteria, konsekuensi atau lebih dikenal dengan variabel terikat dengan simbol Y.⁹ Secara spesifik, variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

2. Indikator Variabel

Indikator variabel merupakan acuan empiris dari beragam variabel

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 38.

⁹ *Ibid.*, 39.

yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun peran dari indikator variabel adalah sebagai alat ukur variabel dalam mendeteksi variabel yang akan digunakan pada penelitian ini.¹⁰ Adapun indikator variabel pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (X_1)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Restribusi Daerah
- b. Dana Alokasi Umum (X_2)
 - a. APBD
 - b. Pendanaan untuk Desentralisasi
- c. Dana Alokasi Khusus (X_3)
 - a. Kebutuhan di kawasan Tranmigrasi
 - b. Kebutuhan Investasi
 - c. Kebutuhan Sarana Prasarana
- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

- 1) Melaporkan Informasi Pencapaian Pendapatan

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.¹¹ Adapun devinisi Operasional dari variable-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 38.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 40.

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan UUD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dll.

2. Dana Alokasi Umum (X_2)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian dana perimbangan.

3. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian dana perimbangan.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

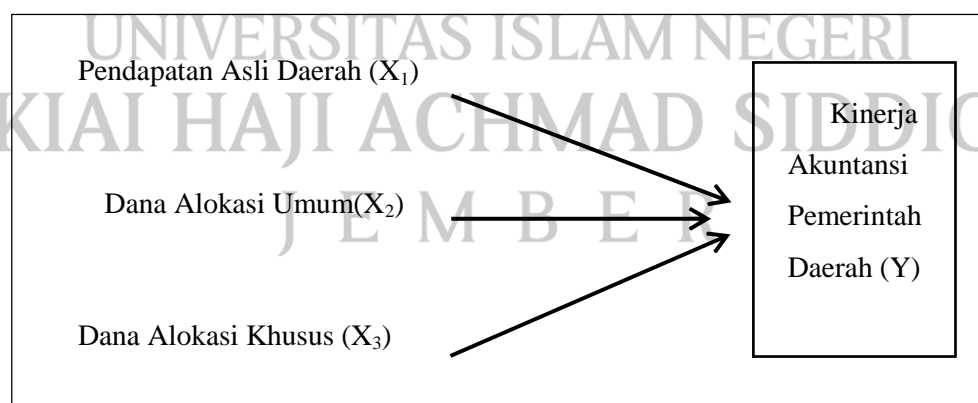
Kinerja keuangan adalah evaluasi suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas secara keseluruhan. Secara internal, kinerja keuangan diperiksa untuk menentukan tolak ukur atau pencapaian pendapatan. Sedangkan bagi eksternal kinerja

keuangan dianalisis untuk menentukan peluang investasi potensial.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian dapat disebut juga sebagai anggapan dasar yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar di samping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dalam merumuskan hipotesis.¹² Asumsi pada penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat dilihat kerangka konseptual (conceptual framework) Berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Gambar I.1 Kerangka Konseptual Pemikiran

¹² Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah disusun di mana rumusan masalah tersebut dirangkai dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis mempunyai sifat sementara dikarenakan jawaban yang diberikan berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan dan belum di sempurnakan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis dapat diartikan pula dengan jawaban teoritis dari rumusan masalah dan belum termasuk jawaban empiris atas suatu permasalahan.¹³ Adapun hipotesis dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting untuk menentukan kemampuan daerah dalam menyelesaikan kegiatan pemerintahan otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah. daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut diperlukan untuk mendanai segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 64.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nughroho dan Rohman, yang mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.¹⁴

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh pendapatan Belanja Daerah.¹⁵

Perhitungan Dana Alokasi Umum didasarkan pada faktor murni yaitu dana yang diberikan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU)

¹⁴ Berti Indah Sari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat" *E-Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. (2021),4

¹⁵ Made Ari Juniawan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten di Provinsi Bali" *E-Jurnal manajemen*. (2018), 1264.

diberikan dengan cara perhitungan rumus. Sedangkan faktor penyeimbang yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi penurunan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya di daerah dalam kegiatan pembelanjaan yang merupakan tanggung jawab masing-masing daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap kinerja akuntansi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja akuntansi pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima, berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan UU-No. 33 tahun 2004 menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bantuan *finansial* berasal yang diberikan pemerintah pusat yang secara khusus diberikan di daerah tertentu yang digunakan mendanai keperluan daerah secara khusus yang merupakan kebutuhan seragam dengan program nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Ardy, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny, yang menyatakan bahwa, belanja daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.¹⁶

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dengan tujuan untuk menggambarkan atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁷

Penelitian deskriptif adalah salah satu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁸

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada

¹⁶ Ibid. 24

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 15.

¹⁸ Ibid, 21.

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁹ Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generasi terdiri atas yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Dalam penelitian ini populasinya adalah pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Hasil dari sampel tersebut dipelajari dan kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan Teknik *nonprobability* sampling yaitu *purposive sampling* karena terbatasnya tenaga dan tidak memungkinkan pengambilan data secara keseluruhan. Purposive sampling adalah sampling yang berisi orang khusus yang dapat memberikan informasi atau orang itu memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.²¹

Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak

¹⁹ Nanang Martoyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 74.

²⁰ Sugoyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 215.

²¹ Imam Ghazali, *Desain penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Semarang: Yoga Pratama, 2016).

36 orang dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Warga BPKAD yang menjabat ketua, sekretaris dan kepala
- 2) Warga BPKAD yang berada dibagian Anggaran

3. Teknik dan Instrumen Pengembalian Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Kuesioner/Angket

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya dan responden diminta untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang sangat efisien jika digunakan dalam penelitian yang bersifat *deskriptif* atau *eksplanatori*.²²

Untuk pemberian skor pada angket dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. *Skala likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.²³ Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *skala likert* sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kriteria Skala Likert

No	Keterangan	Simbol	Skor
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

²² Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 107.

²³ Siregar, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Jakarta: BPFE, 2013),67.

Sumber: Imam Ghozali, 2002.

Penggunaan kelima kategori dalam skala di atas dapat dipandang mewakili dengan baik tingkat intensitas penilaian responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar kuisisioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuisisioner yang diberikan kepada semua responden secara langsung.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kuantitatif. pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *statistik deskriptif*. *Statistik deskriptif* adalah salah satu analisis statistik dengan tujuan untuk menganalisis data melalui deskripsi atau gambaran data dari proses pengumpulan data sebelumnya. Dalam penelitian digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi atau data variabel yang di dapat dari kuisisioner secara umum.²⁴

Data statistik disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif yang menjelaskan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk melihat nilai terendah dan tertinggi dari sampel. *Mean* digunakan untuk memperkirakan

²⁴ Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, Dan Nurjannah, *metode Statistika Multivariat: Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan Warppls* (Malang: UB Press, 2017), 165.

nilai rata-rata populasi dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai penyimpangan. rata-rata dari sampel. Seluruh komponen tersebut dipergunakan untuk menjelaskan keseluruhan sampel penelitian serta penyeleksian populasi yang akan dijadikan sampel penelitian.

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis data berupa uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Data

1) Uji Validitas

Uji validitas data adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulakn oleh peneliti.²⁵

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis item yang mengkorelasi skor tiap butir, skor total yang merupakan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 193.

jumlah dari skor tiap butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.

2) Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas atau uji kehandalan adalah uji konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner.²⁶ Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*.

Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama (konsisten).²⁷ Dalam penelitian ini cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *cronbach alpha* di mana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 25. Jika nilai *cronbach alpha* pada kuesioner $> 0,60$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya .

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi kelayakan data yang dianalisis serta terhindar dari suatu penyimpangan. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1) Uji Normalitas

²⁶ Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 147-148

²⁷ Riduan Dan Sunarto, *Pengantar Statistika* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 348

Uji normalitas merupakan suatu uji kelayakan atas distribusi data pada setiap variabel yang digunakan untuk mendeteksi kenormalan data.²⁸ Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji *statistik*. Untuk melihat normalitas residual, analisis grafik ini dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Distribusi data beresidu normal apabila regresi dari hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Sedangkan distribusi data dikatakan beresidu tidak normal apabila regresi dari hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05.²⁹

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu uji kelayakan atas dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna.³⁰ Uji multikolinieritas yang dilakukan dalam penelitian melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.

²⁸ Duwi Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariate Dengan SPSS* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), 56.

²⁹ Bambang Suharjo, *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 103-104.

³⁰ Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*, 59.

b) Sedangkan apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 maka menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.³¹

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak heteroskedastisitas.³²

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai predicated standardized. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah Heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati di mana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertical.³³

a) Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara

³¹ Suharjo, *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*, 99-100.

³² Husain Umar, *Desain Penelitian MSDM Dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivisik Dan Berbasis Pemecahan masalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 142.

³³ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: Andi, 2011), 95.

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih satu variabel prediktor (variable bebas) terhadap variabel terikat.³⁴

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah pembangunan desa. Adapun persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja keuangan Daerah a : Konstanta

b : Koefisien Variabel

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : Dana Alokasi Khusus

e : eror

b) Uji Hipotesis

(1) Koefisien Determinasi

³⁴ Algifari, *Analisis Statistik Untuk Bisnis: Dengan Regresi, Korelasi Dan Nonparametrik* (Yogyakarta : Bpfe, 1997), 79.

Koefisien determinasi merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengukur tingkat prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.³⁵ Umumnya, nilai koefisien determinasi terletak di antara angka nol dan satu. Koefisien determinasi dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- (a) Apabila nilai koefisien determinasi menunjukkan angka terkecil yakni nol (0) maka variabel independen kurang serentak dalam menjelaskan variabel dependen.
- (b) Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi menunjukkan angka yang mendekati satu atau satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.³⁶

(2) Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik t merupakan uji koefisien yang digunakan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel dependen serta mengidentifikasi tingkat pengaruh kesignifikannya.³⁷ Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji statistik t sebagai berikut:

- (a) Apabila nilai $\text{sig} < (0,05)$ maka hipotesis diterima dengan artian bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh

³⁵ Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*, 56

³⁶ Suharjo, *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*, 79.

³⁷ Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, dan multivariate dengan SPSS*, 50-51.

signifikan terhadap variabel dependen.

(b) Sedangkan apabila nilai $\text{sig} > (0,05)$ maka hipotesis ditolak dengan artian bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.³⁸

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.³⁹

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan definisi operasional.

Bab II Kajian Kepustakaan

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan penelitian terdahulu serta teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian

Bab III Penyajian Data Dan Analisis Data

Bab ini memuat hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan dilengkapi dengan saran dan di akhiri dengan penutup.

³⁸ Suharjo, *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*, 88.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya*, 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

- a. Ririn Yuni Ariska melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”*. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PAD, Dana Perimbangan, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi Sumatera Utara.⁹ peneliti ini sama-sama meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan memiliki perbedaan variabel dependen atau variabel terikat tentang akuntansi pemerintah daerah.

- b. Asti Mutiara, *“Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal”*. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD,

⁴⁰ Ririn Yuni Ariska, *“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”*. (Skripsi, Universitas Muhammad Sumatera Utara Medan, 2021).

DAU, DAK Dan DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ;

- a. PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019.
 - b. DAU secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019.
 - c. DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019.
 - d. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019.⁴¹
- c. Fitri S, *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”*. fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diujikan dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai konstanta -420.892 yang artinya apabila variable Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap maka Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -420.892 %

⁴¹ Asti Mutiara, “Pengaruh PAD,DAU,DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal”. (Skripsi, Universitas Panca Sakti Tegal, 2020).

dan koefisien regresi sebesar 0,370 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1% menyebabkan meningkatnya Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,370%. Pengaruh signifikan ini dapat diketahui dari nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu ($8.030 > 2.571$) pada alfa 5%(0.05). sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0.915 nilai ini menyatakan bahwa belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 91,5% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan sisanya 8.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.⁴²

- d. Lutfhi Ari Suhandana, “*Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan tersebut adalah analisa yang telah dilakukan pada variabel XI yaitu DAU memiliki angka signifikansi sebesar $0,062 > 0,10$ dan t hitung sebesar $1,922 > t$ tabel sebesar 1,68385, kemudian nilai koefisien sebesar 0, 182, artinya jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan dari DAU semakin besar ataumengalami peningkatan maka hal ini juga aka mempengaruhi peningkatan dan pengaruh terhadap Belanja Daerah.⁴³

⁴² Fitri S, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

⁴³ Lutfhi Ari Suhandana, “Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

- e. Een Beana Pratiwi, “ *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Papua Dan Papua Barat Tahun 2016*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016 dengan jumlah Kabupaten dan Kota yaitu 42.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dengan arah negatif, DAK Dan DBH berpengaruh positif terhadap modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK Dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.⁴⁴

- f. Riska Rahmalia, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan periode tahun 2014-2017.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, DBH berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.⁴⁵

⁴⁴ Een Beana Pratiwi, “Pengaruh PAD,DAU,DAK DAN DBH Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Papua Dan Papua Barat Tahun 2016”. (Skripsi, Universitas Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta, 2020).

⁴⁵ Rizka Rahmalia, “Pengaruh PAD,DAU,DAK Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017”.

g. Rudi Indra Pratama, “*Analisis Pengaruh PAD,DAU, DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap alokasi belanja modal dengan PDRB sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah

- a. Secara parsial hasil penelitian PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara,
- b. Secara parsial hasil penelitian DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- c. Secara parsial hasil penelitian DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- d. Secara parsial produk Dosmetik Regional Bruto Sebagai variabel moderasi memperkuat DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.⁴⁶

h. Hanisya Ursilla Lubis, “*Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal Kota Medan*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan pada uji simultan bahwa

(Skripsi, Universitas sriwijaya Palembang, 2020).

⁴⁶ Rudi Indra Pratsama, “*Analisis Pengaruh PAD,DAU, DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

PAD, DAU, DAK Dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.⁴⁷

- i. M. Abduh Al-Latief melakukan penelitian dengan judul “ *Pengaruh PAD, DAU, DBH Dan Fiscal Stress terhadap kinerja keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil Dan *fiscal stress* di Wilayah Sumatera Bagian Utara.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan tersebut adalah pengaruh PAD, DAU, dan DBH dan *Fiscal Stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara.

- j. Mujahidin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”. fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada tahun 2016-2017 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.168.865.893.977,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.176.036.300,40 atau selisih lebih sebesar Rp. 18.310.142.323,40.

Sedangkan pada tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar

⁴⁷ Hanisya Ursilla Lubis, “Pengaruh PAD,DAU,DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

⁴⁸ M. Abduh Al-Latief, “Pengaruh PAD,DAU,DBH Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara”. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

Rp.250.897.134.625,00 dan terealisasi sebesar Rp.268.339.203.299,15 atau selisih lebih Rp.17.442.068.674,15.⁴⁹

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ririn Yuni Ariska (2021)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Sama-sama meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat tentang akuntansi pemerintah daerah sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang berpengaruh positifnya terhadap kinerja keuangan Daerah
2	Asti Mutiara (2020)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Sama-sama meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU Dan DAK	Penelitian ini memiliki variabel dependen terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Alokasi Belanja Modal.
3	Fitri S (2020)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”	Sama-sama meneliti tentang pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini memiliki variable dependen atau variable terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang belanja modal.
4	Lutfhi Ari Suhandana (2020)	“Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh	sama-sama meneliti tentang DAU Dan PAD	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat

⁴⁹ Mujahidin, “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

				(Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Belanja Daerah.
5	Een Beana (2020)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Papua Dan Papua Barat Tahun 2016	Sama-sama meneliti tentang PAD, DAU Dan DAK	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Belanja Modal.
6	Rizka Rahmalia (2020)	Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan (DBH,DAU Dan DAK) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017)	sama-sama meneliti tentang PAD,DAU Dan DAK	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Belanja Daerah
7	Rudi Indra Pratama (2019)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provindi Sumatera Utara Tahun 2010-2018.	Sama-sama meneliti tentang PAD, DAU, Dan DAK.	Penelitian ini memiliki variable dependen atau variable terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang belanja modal.
8	Hanisya Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal	Sama-sama meneliti tentang PAD, DAU Dan DAK	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian

				sebelumnya meneliti tentang Belanja Modal.
9	M. Abduh Al- Latief (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara	Sama-sama meneliti tentang pengaruh PAD	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat (Y) tentang kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya hanya dibatasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Dana bagi hasil dan <i>fiscal stress</i> saja.
10	Mujahidin (2018)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	Sama-sama meneliti tentang pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini memiliki variabel dependen atau variabel terikat (Y) tentang kinerja akuntansi pemerintah daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Badan Pendapatan Daerah.

Sumber: Data Diolah Dari Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah ditemukan oleh peneliti, sebagai acuan penyajian hasil peneliti yang dirasa masih cukup relevan dengan apa yang dilakukan peneliti. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bondowoso.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan

semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian⁵⁰

Kajian teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 40.

⁵¹ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN* Yogyakarta, 2011.H.99

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya, semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

c. **Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1) Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah). Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dapat dirinci menjadi (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 1)⁵². Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas :

- (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

⁵² Ibid, H.25.

permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota. Pajak ini terdiri atas :

- (1) Pajak hotel.
- (2) Pajak restoran.
- (3) Pajak hiburan.
- (4) Pajak reklame.
- (5) Pajak penerangan jalan.
- (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- (7) Pajak parkir.

2) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri atas :

- a) Retribusi jasa umum.
- b) Retribusi jasa usaha.
- c) Retribusi perizinan tertentu (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 2).

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan yang meliputi :

- a) Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi (UU No.33/2004,

Pasal 6 ayat 3).

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 4).

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Definisi Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*. Sedangkan dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah.⁵³

⁵³ Muskaria Adami, “ Analisis pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung pemerintah Kabupaten Simeulue”, (Skripsi, Univeritas Teuku Umar, 2016.)

b. Penghitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 33/2004, Pasal 27). Sedangkan menurut Halim, berdasarkan pendekatan kesenjangan fiskal besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) relatif besar. Dalam LRA, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari

Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Dana Alokasi Khusus

a. Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁵⁴

b. Tujuan Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang Undang No. 33/2004 Pasal 38 dinyatakan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pasal 39 UU ini juga dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis

⁵⁴ Ibid.,

yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah menetapkan kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

d. Kebutuhan yang dipenuhi oleh Dana alokasi khusus (DAK)

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- 2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- 3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- 4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi

dampak kerusakan lingkungan.

- 5) Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dicantumkan dalam APBD. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

4. Kinerja Keuangan Daerah

a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.⁵⁵

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber- sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam

⁵⁵ Bahrul, "keuangan pemerintah daerah otonomi di Indosiar". (Skripsi, Universitas Indonesia Press-Jakarta,2002).

menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi Pemerintah Daerah melalui pengukuran kinerja pada setiap aktivitas kegiatannya, baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

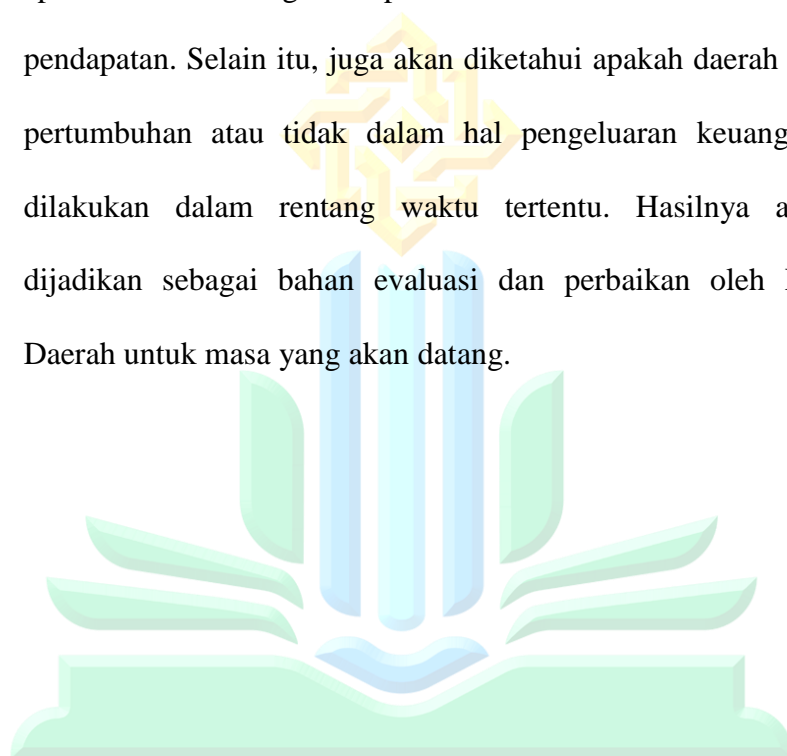
c. Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah Pemerintah Daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer yang terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi untuk kota/kabupaten), dan Lain-lain Pendapatan

yang sah.

- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso dalam konteks organisasi adalah sebuah instansi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (BPKAD) sebagai lembaga teknis pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso dan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu BPKAD Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab terhadap pengelolaan asset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi keuangan yang mendukung penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Struktur, visi dan misi, dan jumlah staf Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, terdiri atas:

- a. Kepala Badan (Drs. Wiratmo Mulyanto, S.Pd.,)
- b. Sekretariat (Misbiyati, SE., M.Si.)
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Komang Sunarwo, S.Sos.)
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset (Lely Dinihari, SE., Ak.)
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ninit Handayani)
- c. Bidang Anggaran (Wayan Wisesa Buwana, SE)
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan (Santi Wirastuti, SE)
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan (Dina Rulyanti, SP.MM.)
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran (Novantyo Trias W, SE., M.Si.)
- d. Bidang Perbendaharaan (Widodo, S.Sos.)
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan dan Penyediaan Dana (Yohan Tristyanto, S.Sos.)
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung (Sri Yuliasutik, S.Sos.)
 - 3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung (Sujoko, Sos.)

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Teguh Setyo Wijanarko, SE., MM.)
 - 1) Sub Bidang Akuntansi (Irma Oktavia Purwarini, SE., MM.)
 - 2) Sub Bidang Informasi Keuangan (Frenni Ernis, SE., MM.)
 - 3) Sub Bidang Bina Akuntansi (Ghandy Prahsetyo Wibowo, SE., MM.)
 - f. Bidang Manajemen Aset (Wahyu Akbar Firdaus, S.Sos., M.Si.)
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset (Eko Bambang Visianto, SE.)
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset (Ninies Kurnia K, SE)
 - 3) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset (Eko Slamet Wahyudi, SE.MM.)
3. Visi dan Misi Organisasi Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuptaen Bondowoso

Visi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih (2019-2023) adalah

- a. Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan Dalam Bingkai, Iman dan Taqwa.

Adapun Misi yang di emban Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kepala Daerah adalah

- a. Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif dan Inovatif.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso mwnyusun Rencana Kerja Tahun 2021.

B. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini yaitu tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah” diperoleh dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner yang disebarakan kepada 20 responden dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Pria	17
2	Wanita	19
Total		36

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas lebih banyak perempuan dengan jumlah 19 responden, sedangkan responden pria berjumlah 17 responden.

2. Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi
1	SMA	9
2	D3	4
3	S1	16
4	S2	4
5	S3	3
Total	36	36

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, klasifikasi responden berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwasanya mayoritas dalam penelitian ini adalah S1 yang berjumlah 16 responden, disusul Pendidikan SMA yang berjumlah 9 responden, D3 sejumlah 4 responden, S2 berjumlah 4 responden dan yang terakhir pendidikan S3 yang berjumlah 3 responden.

3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Menduduki Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Menduduki Jabatan

No	Menduduki Jabatan	Frekuensi
1	< 1 Thn	8
2	1-5 Thn	17
3	5-10 Thn	5
4	>10 Thn	6
Total		36

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, klasifikasi responden berdasarkan menduduki jabatan menunjukkan bahwasanya mayoritas dalam penelitian ini menduduki jabatan selama 1-5 tahun berjumlah 17 responden, disusul dengan yang menduduki jabatan <1 tahun berjumlah 8 responden, yang melebihi 10 tahun berjumlah 6 responden, sedangkan 5-10 tahun hanya berjumlah 5 responden.

C. Analisis Dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu koesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan untuk diuji valisitasnya. Jika r hitung $>$ r tabel dimana $df=n-2$ dengan signifikan 5% maka dinyatakan valid.⁵⁶

1) Variabel Pendapatan Asli Daerah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	13.46	1.785	.695	.804
X1.2	13.46	1.844	.758	.778
X1.3	13.40	2.012	.605	.840
X1.4	13.43	1.782	.694	.804

Sumber : Olah data SPSS Versi 25

⁵⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018),51.

2) Variabel Dana Alokasi Umum

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	8.77	1.123	.476	.817
X2.2	8.83	1.029	.593	.686
X2.3	8.80	.988	.738	.527

Sumber : Olah data SPSS Versi 25

3) Variabel Dana Alokasi Khusus

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	30.97	10.029	.787	.931
X3.2	30.97	10.029	.787	.931
X3.3	30.97	10.029	.787	.931
X3.4	30.80	10.400	.736	.934
X3.5	30.86	9.832	.825	.928
X3.6	30.94	10.291	.789	.931
X3.7	30.94	10.114	.749	.933
X3.8	30.94	9.938	.806	.929

Sumber : Olah data SPSS Versi 25

4) Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	26.54	6.020	.559	.783
Y2	26.49	6.728	.345	.815
Y3	26.77	5.358	.564	.786
Y4	26.69	5.987	.467	.800
Y5	26.60	5.953	.521	.789
Y6	26.54	5.903	.698	.762
Y7	26.71	5.857	.768	.754

Sumber : Olah data SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan variabel Y memperoleh r hitung lebih besar dari pada r tabel dengan signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan pada kuesioner penelitian ini valid dan dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan data.

b. Uji Reliabilitas Data

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja. Alat ukur untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka dikatakan reliabel dan sebaliknya. Hasil pengujian masing-masing instrumen dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut :

1) Uji Pendapatan Asli Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 3.4

Hasil Uji Reliabilitas Pendapatan Asli Daerah (X_1)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.848	4

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,848 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari Pendapatan Asli

Daerah (X_1) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Yang dimaksud reliabel adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil yang sama pada setiap percobaan berhasil atau dalam artian hasil yang dapat dipercaya.

2) Uji Reliabilitas Dana Alokasi Umum

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Dana Alokasi Umum (X_2)

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.764	3

Sumber Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,764 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari Dana Alokasi Umum (X_2) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Reliabel adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil setiap percobaan berhasil atau hasil yang dapat dipercaya

3) Uji Reliabilitas Dana Alokasi Khusus

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Dana Alokasi Khusus (X_3)

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of items
.939	8

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,939 > 0,60$, sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari Dana Alokasi Khusus (X_3) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. yang dimaksud reliabel adalah indeks yang menunjukkan hasil yang setiap percobaan berhasil atau hasil tersebut dapat dipercaya.

4) Uji Reliabilitas Kinerja Keuangan (Y)

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Keuangan (Y)

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.810	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,810 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari Kinerja Keuangan (Y) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Yang dimaksud reliabel adalah indeks yang menunjukkan hasil setiap percobaan berhasil atau dapat diartikan hasil tersebut dapat dipercaya.

2. Uji Asumsi Klasik

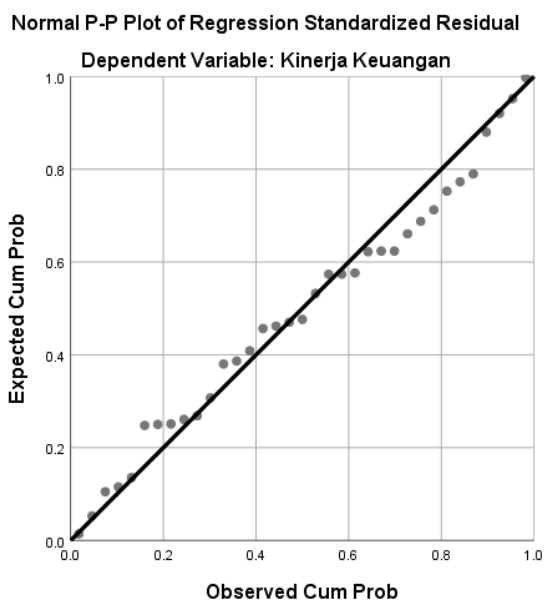
Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi

normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁵⁷

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hasil uji normalitas data menggunakan bantuan SPSS versi 25 adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Dari tampilan grafik normal *plot*, terlihat titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

⁵⁷ Ibid., 161.

Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.⁵⁸

Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan SPSS versi 25 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.988	1.012
	DAU	.791	1.264
	DAK	.787	1.271

(Sumber : Output SPSS 25 (Laporan Kinerja Keuangan, Diolah))

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai tolerance $0,988 > 0,1$ dan nilai VIF $1,012 < 10$ berarti tidak terjadi multikolinieritas. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance $0,791 > 0,1$ dan nilai VIF $1,264 < 10$ berarti tidak terjadi multikolinieritas. Variabel

⁵⁸ Ibid., 107.

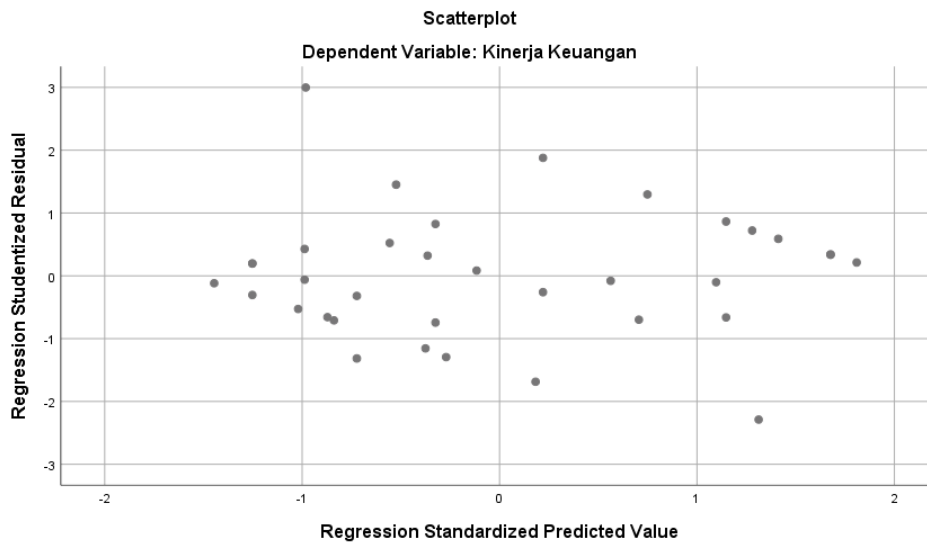
Dana Alokasi Khusus memiliki nilai tolerance $0,787 > 0,1$ dan nilai VIF $1,271 < 10$ berarti tidak terjadi multikolonieritas. Hal ini dapat di artikan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.⁵⁹

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan SPSS Statistics versi 25 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Ibid., 138.



(Sumber : Output SPSS 25 (laporan kinerja keuangan, diolah))

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul disatu tempat. Hal ini membuktikan tidak heterokedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan di bawah ini :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

A = Konstanta

B = Koefisien Variabel

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

X₃ = Dana Alokasi Khusus

e = eror

Hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Understandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	15.012	5.352		2.805	.009
	PAD	-.259	.205	-.163	-1.260	.217
	DAU	.960	.280	.496	3.425	.002
	DAK	.227	.113	.292	2.009	.053

Dependen Variabel : Kinerja Keuangan

(Sumber : Output SPSS 25 (laporan kinerja keuangan, diolah))

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi

linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 15.012 - 0,259X_1 + 0,960X_2 + 0,227X_3 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

a. Konstanta (a) = 15.012

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar 15.012 yang menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat berjalan dengan baik dan tepat, Sehingga kinerja keuangan dapat terealisasikan dengan baik.

b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_1) = -0,259

Nilai Koefisien pada variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,259 yang berarti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai adalah negatif.

c. Koefisien Dana Alokasi Umum (X_2) = 0,960

Nilai Koefisien pada variabel dana alokasi umum sebesar 0,960 yang berarti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai adalah positif.

d. Koefisien Dana Alokasi Khusus (X_3) = 0,227

Nilai Koefisien pada variabel dana alokasi khusus sebesar 0,227 yang berarti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai adalah positif.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen.⁶⁰

Hasil Uji t (Parsial) dengan bantuan SPSS versi 25 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Understandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	15.012	5.352		2.805	.009
	PAD	-.259	.205	-.163	-1.260	.217
	DAU	.960	.280	.496	3.425	.002
	DAK	.227	.113	.292	2.009	.053

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah
Sumber : Data Diolah (Terlampir).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masing-masing t_{hitung} pada variabel pendapatan asli daerah sebesar -1,260, dana alokasi umum 3,425, dana alokasi khusus 2,009. Berdasarkan hal tersebut bisa diketahui bahwa nilai $sig > 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh, sedangkan berdasarkan tabel di atas nilai sig Dana Alokasi Umum lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial variabel tidak berpengaruh terhadap Y.

⁶⁰ Ibid

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y).⁶¹

Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.485	.436	2.109

Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,436 dimana variabel independen mampu menjelaskan sebesar 43,6% terhadap variasi atau permodelan pada variabel dependen.

D. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu dengan berusaha menjawab rumusan masalah, menafsirkan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada atau menemukan teori baru, dan menjelaskan implikasi lain dari penelitian.⁶² Sedangkan jawaban dari rumusan masalah dan penafsiran temuan penelitian dapat terjawab melalui hasil hopotesis berikut:

⁶¹ Ibid., 97.

⁶² Tim Penyusun, *Karya Ilmiah*,.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bondowoso, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Besarnya penerimaan Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada suatu periode dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan kehendak pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber permintaan daerah yang perlu di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Akan tetapi, sejak adanya covid-19 nyatanya di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah mengalami penurunan di bagian Pendapatan asli Daerah karena dari peneliti menjelaskan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah di pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalami kendala kurangnya maksimal pekerjaan dikarenakan terhambatnya karyawan yang memasuki area

dinas dengan batasan karyawan sehingga pekerjaan memang terlaksana dengan baik hanya saja sedikit melewati jadwal yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Evrintia Dini Putri (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam hal kemandirian daerah di tahun berikutnya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah dipemerintah daerah kabupaten Bondowoso. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum, maka Pengelolaan Keuangan akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya, jika semakin rendah Kinerja keuangan terhadap Dana Alokasi Umum, maka Pengelolaan Keuangan juga akan semakin menurun.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah. Pengelolaan Kinerja Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah di wilayah Bondowoso mengalami kenaikan dikarenakan Kinerja yang dilakukan karyawan baik sehingga Dana Alokasi Umumnya mempunyai nilai di atas rata-rata.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Julitawati(2020) yang menguji pengaruh Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bondowoso, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah dipemerintah daerah kabupaten Bondowoso. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus, maka

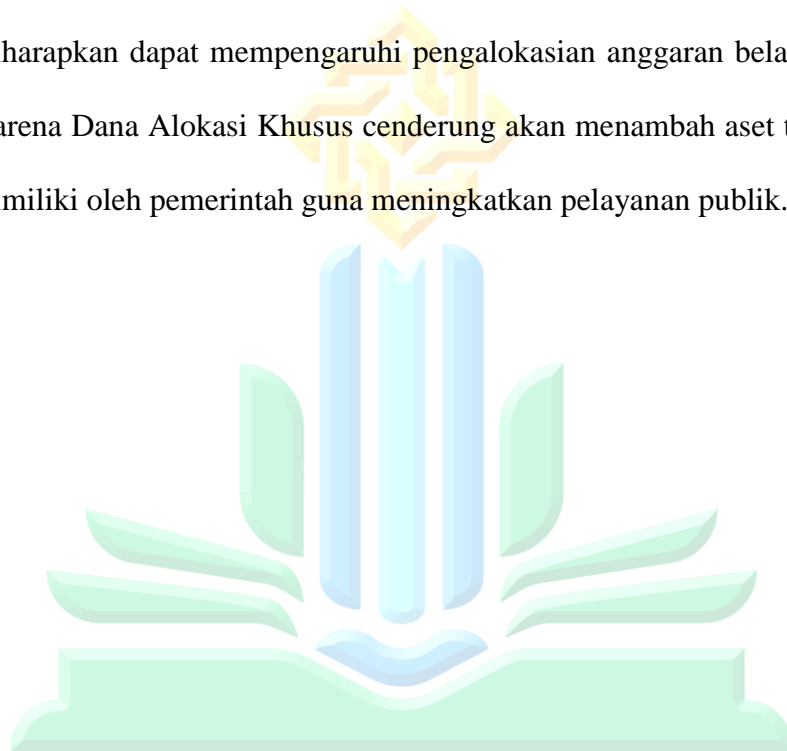
Pengelolaan Keuangan akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya, jika semakin rendah Kinerja keuangan terhadap Dana Alokasi Khusus, maka Pengelolaan Keuangan juga akan semakin menurun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Bondowoso bahwasanya dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan di pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Kinerja Keuangan Bondowoso mengalami peningkatan dikarenakan karyawan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dan maksimal terhadap waktunya sehingga tidak mengalami penurunan yang mengakibatkan adanya Kinerja yang kurang maksimal.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Isti Permatasari (2020) yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Bondowoso”** maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah daerah. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
2. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di pemerintah daerah. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari pada 0,05. Maka, apabila nilai Dana Alokasi Umum meningkat, maka Kinerja Keuangan di pemerintah Daerah Bondowoso juga ikut meningkat.
3. Hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Kinerja Keuangan di pemerintah daerah tidak berpengaruh, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan diteliti lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif dengan variabel-variabel lain yang relevan.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan penelitian sejenis serta untuk menambah koleksi perpustakaan.

3. Bagi Dinas

Disarankan untuk lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di pemerintah daerah seperti disiplin dalam membagi waktu dan untuk karyawan lebih ditingkatkannya kinerja masing-masing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

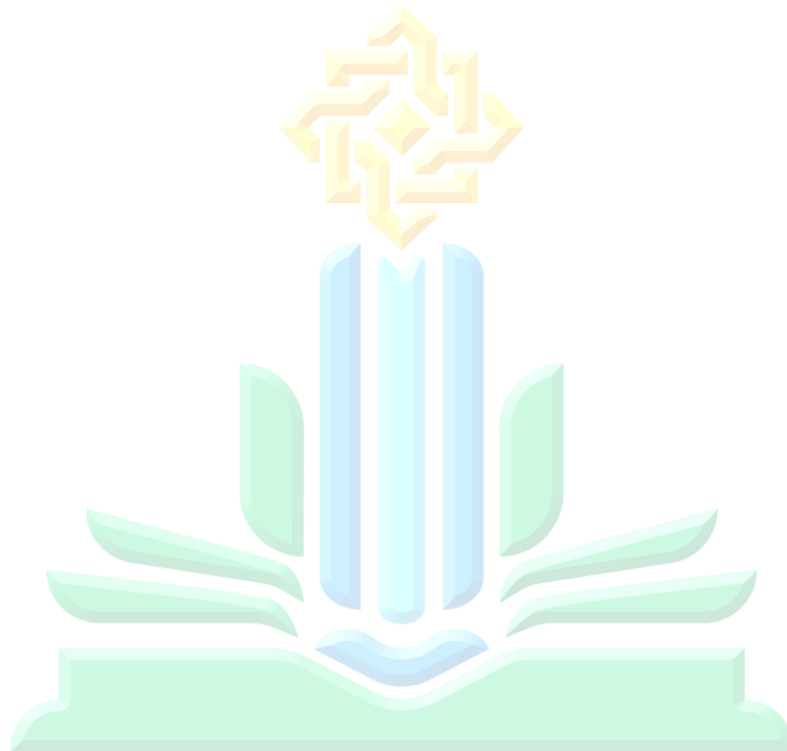
DAFTAR PUSTAKA

- Abduh M. Al-Latief. 2018. *Pengaruh PAD, DAU, DBH Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan
- Algifari.1997. *Analisis Statistik Untuk Bisnis: Dengan Regresi, Korelasi Dan Nonparametrik* Yogyakarta : Bpfe.
- Ari Juniawan, Made. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen.
- Ari Suhandi,Luthfi. 2020. *Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Beana Pratiwi, Een. 2020. *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Papua Dan Papua Barat Tahun 2016*. Skripsi : Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Chrisanty Paat, Dewi dkk. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung*. Skripsi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ferdiansyah, Abdullah. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*.Jurnal. Universitas Bengkulu.
- Ghazali, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* . Semarang: Yoga Pratama.
- Indra Pratama, Rudi.2019. *Analisis Pengaruh PAD,DAU,DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kresna Pramudya,Farhan. *Analisis Pengaruh PAD,DAU,DAK terhadap belanja modal*. Skripsi: Universitas Muhammad Malang.
- Martoyo, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhamad, Karyadi. 2020. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Journal Ilmiah Rinjani.Vol 2.

- Muhamad, Karyadi. 2020. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Journal Ilmiah Rinjani. Vol 2 Mujahidin.2018. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada*
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mutiara, Asti. 2020. *Pengaruh PAD,DAU,DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal*. Skripsi : Universitas Panca Sakti Tegal.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rahmalia, Rizka. 2020. *Pengaruh PAD,DBH,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017*. Skripsi : Universitas Sriwijaya Palembang.
- Riduan dan Sunarto. 2009. *Pengantar Statistika*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- S,Fitri. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal*
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siregar. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Jakarta: BPFPE.
- Solimun dkk. 2017. *Metode Statistika Multivariat: Pemodelan Persamaan Structural Pendekatan Warppls*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo, Bambang. 2008. *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharjo. *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*.
- Suharto,Babun dkk, *Pedoman penulisan karya Tulis Ilmiah Jember : IAIN Jember*, 2018.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM Dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivisik Dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ursilla Lubis, Hanisya. 2019. *Pengaruh PAD,DAU,DAK Dan DBH Terhadap Belanja Modal*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Yuni Ariska, Ririn.2021. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi : Universitas Muhammad Sumatera Utara Medan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Atikah
NIM : E20183012
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Pengaruh Persepsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah di kabupaten Bondowoso ”* adalah benar-benar karya asli tulisan saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya. Maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember 16 Desember 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SITI ATIKAH

E20183012

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama : _____ (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1
 S2 S3
4. Lama Bapak/Ibu menduduki jabatan ini :
 <1 Thn 5 – 10 Thn
 1 – 5 Thn > 10 Thn

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda () pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk menyatakan persepsinya.

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pertanyaan berikut akan menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang Pendapatan Asli Daerah dipemerintah Daerah.

No.	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Pajak daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar di pemerintah daerah					
2	Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat					
3	Peraturan yang mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah sudah dilaksanakan					
4	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari pajak daerah sudah dilaksanakan					

2. Dana Alokasi Umum

Pernyataan berikut akan menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang Dana Alokasi Umum.

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sudah sesuai dengan program yang dijalankan.					
2.	Dana Alokasi Umum yang berada di Dinas sudah memenuhi kriteria yang tersusun sejak awal.					
3.	Dana Alokasi Umum yang berada di Dinas sudah menjalankan apa yang diperintahkan.					

3. Dana Alokasi Khusus

Pernyataan berikut akan menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang Dana Alokasi Khusus.

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan seara tepat sudah sesuai dengan program yang dijalankan.					
2.	Pada variabel Dana Alokasi Khusus, tujuan rencana kerja telah disesuaikan pendapatan dan kinerja keuangan.					
3.	Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat telah diketahui sangat jelas dan spesifik.					
4.	Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat sudah sesuai keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai kinerja keuangan					
5.	Pada tempat yang saya teliti, kejelasan Dana Alokasi Khusus dan merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan kinerja keuangan secara efektif.					
6.	Dana Alokasi Khusus telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan kinerja keuangan secara efektif.					
7.	pelaksanaan Dana Alokasi Khusus secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas karyawan, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi karyawan tentang tugas dan kewajibannya.					
8.	Dana Alokasi Khusus sudah menjalankan sesuai standar untuk mengavaluasi kinerja keuangan.					

4. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pernyataan berikut akan menggambarkan persepsi Bapak/Ibu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pemerintah diharapkan mampu mengelola dan menggunakan kinerja keuangan untuk membiayai pemerintah daerah.					
2.	Pemerintah mampu mengelola dan menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) secara efektif dan efisien sesuai kinerja keuangan yang berlaku.					
3.	kinerja keuangan dilaksanakan dengan baik, disiplin dan jelas.					
4.	Adanya pelatihan, pemberian kepercayaan, keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengakuan merupakan salah satu syarat untuk mencapai kinerja keuangan.					
5.	Kewajiban para pegawai untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap kinerja keuangan.					
6.	semakin baik kinerja keuangan, semakin dapat mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam keuangan yang dilakukan obyek pemeriksaan.					
7.	semakin baik kinerja keuangan pemerintah, semakin mudah mencari penyebab munculnya kesalahan serta dapat memberikan rekomendasi untuk menghilangkan penyebab tersebut.					



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-553/UIN.20/7.a/PP.00.9/10/2021 18 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
Jl. Khairil Anwar No. 297, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214
Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Atikah
NIM : E201813012
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Abdul Rokhim
Abdul Rokhim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Letjen Suprpto No. 68 ☎ (0332) 421819
e-mail: bpkad.bondowosokab@gmail.com website: http://www.bondowosokab.go.id
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
Nomor: 800 / 1143 / 430.10.3/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. WIRATMO MULYANTO, S.Pd., M.Si.**
NIP : 196407081993021001
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SITI ATIKAH**
NIM : E20183012
Program Studi: Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan sudah melaksanakan Penelitian Tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan 13 Desember 2022

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 16 Desember 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Drs. WIRATMO MULYANTO, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196407081993021001

UNIVERSITAS AL-FALAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian Jl. Letjen Suprpto No. 68, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	06 September 2022	menyerahkan surat ijin penelitian	
2	13 September 2022	diterima penelitian	
3	13 September 2022	meminta data profil dan data yang diperlukan	
4	20 September 2022	menyebarkan kuesioner	
5	13 Desember 2022	mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah



Drs. M. Mulyanto, S.Pd., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-22.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Siti Atikah
NIM : E20183012
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan di
Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Desember 2022
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : SITI ATIKAH

NIM : E20183012

Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 16 Desember 2022
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,


Nur Ika Mauliyah SE., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Penyerahan angket



Penyerahan Surat selesai Penelitian



Meminta data





Penyerahan Data



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA DIRI



Nama : Siti Atikah
NIM : E20183012
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Mei 1999
Alamat : Desa Taman RT/RW, 065/007, Kecamatan Grujugan Kabupaten
Bondowoso
No. Hp : 085212550896
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

No	institusi Pendidikan	Tahun
1	TK Al-Ikhlas Grujugan Bondowoso	2005-2006
2	SDN Taman 03 Bondowoso	2006-2012
3	SMP Nurul Jadid	2012-2015
4	SMA Nurul Jadid	2015-2018
5	UIN KHAS Jember	2018-2022